

Demokratisasi Pembangunan Ekonomi Nasional dan daerah

Oleh :

Marsuki

**Disampaikan dalam diskusi panel “Simpul Demokrasi”
Kab. Jeneponto Sulsel.**

Tema: Bisnis, Politik, Demokrasi dan Peluang Investasi Daerah.

Jeneponto-Sulsel, 18 Oktober 2006.

Demokrasi dalam Pembangunan Ekonomi

Oleh : Marsuki¹

Dari beberapa ukuran capaian makro ekonomi saat ini, sepintas dapat dikatakan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah saat ini telah menunjukkan kinerja yang cukup efektif. Seperti, pertumbuhan ekonomi yang mencapai rata-rata 6,4 persen, tingkat inflasi yang stabil antara 6-7 persen, posisi cadangan devisa yang mencapai lebih dari U\$ 50 miliar berkat tumbuhnya secara signifikan hasil ekspor, stabil dan menguatnya nilai tukar rupiah, maupun semakin besarnya peran sektor keuangan perbankan maupun pasar modal dalam membiayai sektor-sektor ekonomi tertentu.

Tapi meskipun demikian, rupanya persoalan mendasar yang menjadi indikator langsung terhadap kualitas kesejahteraan rakyat kebanyakan atau masyarakat, banyak pihak menganggap rupanya masih jauh dari harapan bahkan mengkhawatirkan. Seperti tampak dari masih sulitnya menurunkan jumlah orang miskin bahkan terus mengalami kenaikan hingga telah mencapai 37,5 juta orang, serta masih besarnya jumlah pengangguran, yakni sekitar 40 juta orang, akibat sulitnya peluang berusaha.

Berdasarkan dua masalah ekonomi mendasar tersebut maka banyak pengamat kritis merasa khawatir tentang arah dan perilaku kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah saat ini. Bahkan ada yang menganggap bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan tampaknya semakin jauh dari semangat yang telah dicanangkan para *founding fathers* bangsa ini, yakni membangun dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip “*demokrasi ekonomi*”, seperti yang sudah tertuang dalam UUD 45, khususnya pasal 33. Jika disederhanakan hal ini bermakna bahwa perekonomian bangsa disusun berdasarkan “*demokrasi ekonomi*” dimana

¹ Disampaikan dalam diskusi panel “Simpul Demokrasi” Kab. Jeneponto Sulsel dengan Tema : Bisnis, Politik, Demokrasi dan Peluang Investasi Daerah, Jeneponto-Sulsel, 18 Oktober 2006

kemakmuran rakyat banyaklah yang lebih diutamakan dibandingkan kemakmuran orang perorangan atau kelompok-kelompok tertentu. Oleh karena bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok atau sumber-sumber kemakmuran rakyat, maka hal tersebut berarti harus dikuasai dan diatur oleh negara melalui berbagai kebijakan pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kebanyakan.

Jelas tersirat dari pernyataan tersebut bahwa kepentingan rakyat kebanyakan harus diutamakan mulai dari proses penyusunan, pelaksanaan bahkan pengawasan kebijakan ekonomi pemerintah. Dalam hal ini berarti rakyat harus diperlakukan sebagai subyek sekaligus obyek kebijakan ekonomi. Dengan prinsip tersebut berarti rakyat dapat dan harus dipartisipasikan maupun berpartisipasi secara aktif untuk meningkatkan produktifitasnya dalam proses pembangunan.

Tampaknya teori manajemen publik dari *Osborne & Gaebler (1993)* cukup sejalan dengan konsep *demokrasi ekonomi*. Sebab teori tersebut menekankan pentingnya proyek-proyek pembangunan yang diutamakan untuk kepentingan rakyat kebanyakan sebab didasarkan pada tiga prinsip : « *Community oriented* », yaitu prinsip pembangunan yang berorientasi pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat setempat ; kemudian « *Community based* », yaitu prinsip pembangunan yang didasarkan pada kesesuaian atau keberadaan keadaan sumber daya ekonomi masyarakat bersangkutan ; serta « *Community managed* », yaitu prinsip pengelolaan pembangunan oleh masyarakat bersangkutan.

Selain itu, konsep *demokrasi ekonomi* juga sejalan dengan konsep pembangunan dari *UNDP (1998)* yang menekankan pada pendekatan pembangunan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan (*Human development approach*) dengan empat pilarnya : pemberdayaan (*Empower*) ; keadilan (*Equity*) ; produktivitas (*Productivty*) dan kesinambungan (*Sustainable*).

Aspek pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk mendinamisir kelompok masyarakat yang mempunyai kapasitas produktif tapi kurang kesempatan untuk akses pada lingkungan hidup dan usaha yang bersifat moderen dengan tanpa harus menjadi korban tranpalasi nilai dan kelembagaan

pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kemudian, *aspek pemerataan* mengandung makna tersedianya kesempatan yang merata, berimbang dan adil dalam pemanfaatan sumber daya mereka guna peningkatan taraf hidupnya.

Sedangkan, *aspek produktivitas* diartikan sebagai upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian yang harus ramah terhadap tenaga kerja (*Employment-friendly growth*). Sedangkan tentang *aspek kesinambungan*, mengandung makna bahwa pentingnya kegiatan pembangunan diarahkan pada penciptaan kondisi kegiatan yang berkembang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi mendatang.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran normatif tersebut maka dapat dikatakan bahwa konsep demokrasi ekonomi yang telah dicanangkan sejak dahulu oleh para *founding fathers* bangsa ini adalah sejalan dengan pemikiran normatif ilmiah yang telah mengglobal.

Dalam tataran pragmatis di Indonesia, khususnya sejak beberapa pemerintahan reformasi memimpin, konsep demokrasi ekonomi tersebut tampaknya dijabarkan dalam sebutan sebagai sistem “Ekonomi kerakyatan” (*People’s Economy*), dimana hal itu rupanya sudah dikenal luas, bahkan telah dipraktekkan dengan sukses di beberapa negara, diantaranya di Republik Rakyat Cina (RRC).

Secara harfiah sistem ekonomi kerakyatan itu dapat didefinisikan sebagai suatu sistem dimana kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (*popular*) dimana dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang biasanya di klasifikasi sebagai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), terutama dalam kaitannya dengan beberapa kegiatan di sektor pertanian dalam pengertian luas, termasuk peternakan, kerajinan dan pariwisata dan makanan, dsb., yang terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya, namun tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat atau rakyat lainnya.

Sepintas, di Indonesia, kebijakan ekonomi berbasis pembangunan ekonomi kerakyatan sebenarnya telah berusaha diimplementasikan pemerintah; bahkan sejak pemerintahan ORBA melalui berbagai kebijakan dan instrumennya. Tapi sayangnya oleh beberapa pengamat menganggap bahwa hal tersebut masih dalam semangat kepentingan politik praktis pemerintah, jadi belum dalam arti yang sesungguhnya. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yang patut diperhatikan, misalnya belum adanya *blue print* kebijakan ekonomi yang secara tegas memihak pada kepentingan pembangunan dan pemberdayaan sektor ekonomi kerakyatan tersebut. Tergambar dari instrumen-instrumen kebijakan yang digunakan tampaknya masih secara setengah hati, baik dengan kebijakan fiskal, moneter, keuangan, industri, perdagangan maupun yang bersifat sektoral. Akibatnya, para pelaku ekonomi utama, seperti petani, pedagang, pengusaha maupun perbankan tidak mempunyai kepastian tentang peran apa yang harus dimainkan dalam membangun, mengembangkan dan memberdayakan sektor ekonomi kerakyatan tersebut.

Oleh karena itu tampaknya diperlukan pemahaman atau pendekatan baru untuk merealisasikan sistem ekonomi kerakyatan tersebut. Namun yang jelas perlu disadari bahwa dalam kondisi yang serba terbatas seperti saat ini, maka sebenarnya persoalan pembangunan dan pemberdayaan sektor ekonomi kerakyatan harus menjadi tanggungjawab secara otonom dari para pelaku dengan mengambil peran secara aktif sesuai dengan kegiatan-kegiatannya masing-masing, melalui pendekatan secara partisipatif dan bersinergi.

Dimulai oleh pemerintah sendiri, dari tingkat pusat dan daerah yang harus mampu menjadi konseptor, pengarah, fasilitator dan koordinator antar para pelaku secara dinamis dengan menetapkan secara tegas tentang *blue print* pembangunan ekonomi kerakyatan yang jelas bagi para pelaku ekonomi sehingga para pelaku mau secara sukarela untuk berperan serta mulai saat merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kebijakan yang sudah disepakati untuk diimplementasikan. Misalnya secara tegas pemerintah memfokuskan kebijakan pembangunannya yang berbasis agro (*Commodity approach* atau *Comparative advantage*) dalam berbagai tingkatan kegiatannya, misalnya sesuai prinsip petik, olah dan jual. Untuk kepentingan tersebut, maka hal pokok yang pemerintah harus lakukan segera adalah

melakukan reformasi peran dari badan perencanaan pemerintah untuk – menjadi lembaga birokrasi produktif, baik sebagai pusat informasi, fasilitasi dan koordinasi dengan para pelaku ekonomi lainnya, dalam rangka proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan pembangunan ekonomi rakyat. Hal ini bisa terealisasi, terutama jika para pimpinan-pimpinan teknis sektoral mempunyai kapasitas bukan hanya sebagai birokrat politik, tapi sebagai “*birokrat entrepreneur*”, yang harus paham tentang seluk beluk kegiatan produksi, pemasaran, jaringan bisnis sampai dengan masalah pembiayaan dan penjaminan. Dalam kaitan itu, selanjutnya, pemerintah harus mampu melakukan negosiasi politik dengan para politisian yang mewakili rakyat di lembaga dewan perwakilan rakyat, karena terkadang justru lembaga inilah yang sulit diyakinkan pemerintah meskipun itu untuk program-program dari rakyat yang diwakilinya.

Jika semua hal tersebut diatas dapat berjalan, maka pelaku lainnya, utamanya pengusaha di berbagai kegiatannya, baik sebagai produsen, pedagang atau pemasar akan dapat memainkan perannya dengan baik. Namun dalam hal ini, tentu saja dengan adanya beberapa dukungan kebijakan yang benar-benar memihak kepada pengusaha. Misalnya dengan kemudahan perizinan, perpajakan, perlindungan dan kepastian usaha, maka para pengusaha jelas akan secara serta merta berperan untuk mengembangkan usahanya guna mendukung kegiatan sektor-sektor ekonomi unggulan rakyat. Meskipun demikian, dalam hal ini tentu saja diperlukan rasa tanggungjawab secara otonom dari para pengusaha sendiri untuk membangun, mengembangkan dan memberdayakan sektor ekonomi unggulan masyarakat. Sehingga mereka bukan lagi hanya dikenal sebagai pengusaha yang hanya mampu menyampaikan keberatan-keberatan ke pemerintah, pihak lainnya atau hanya sebagai pelaku yang selalu meminta dukungan-dukungan. Yang diharapkan, mereka harus menjadi pengusaha yang mempunyai etika usaha dan punya ideologi ingin membangun ekonomi rakyat, terutama di wilayah mereka berusaha.

Selanjutnya, seandainya hal-hal tersebut dapat terlaksana, maka pihak-pihak lainnya, terutama pihak yang bertanggungjawab membiayai dan menjamin keperluan dana dari para pelaku ekonomi, baik petani maupun para

pengusaha, jelas akan mudah terealisasi. Pada dasarnya, pelaku ekonomi ini adalah pelaku ekonomi yang sangat sensitif dalam menjalankan perannya, karena pertimbangan bahwa dana yang diakumulasi mereka adalah dana masyarakat surplus yang mempunyai biaya dan harus dikembalikan. Sehingga mereka harus benar-benar selektif dalam menyalurkan dananya, baik karena alasan mencari untung tetapi yang utama untuk memenuhi kewajiban bayarnya (likuiditas dan solvabilitasnya). Artinya, jika sudah jelas dan sudah ada kepastian tentang kebijakan ekonomi pemerintah serta para pelaku lainnya, terutama para pengusaha, maka lembaga pembiayaan dan penjaminan ini akan melaksanakan fungsinya secara maksimal.

Akhirnya, demokrasi ekonomi dalam pembangunan suatu wilayah hanya akan dapat terealisasi jika kebijakan ekonomi diarahkan untuk membangun, mengembangkan dan memberdayakan sektor ekonomi rakyat. Hal itu hanya akan dapat tercapai jika peran para stake holders dapat optimal sesuai dengan tanggungjawab dan kewajibannya masing-masing, baik di bidang produksi, pengumpul, pemasaran dan pembiayaan. Diyakini bahwa sistem ekonomi kerakyatan tersebut dapat menjadi pilar strategi pembangunan yang tepat dimasa datang guna mewujudkan demokrasi ekonomi. Alasannya, sebab kebijaksanaan ekonomi kerakyatan akan selalu didasarkan pada azas atau prinsip yang mendahulukan «keadilan baru kemakmuran, *equity with growth approach*» jadi bukan «kemakmuran baru keadilan, *trickling-down effect approach*». Prinsipnya, mendahulukan target keadilan mungkin akan menghasilkan kemakmuran tapi dengan mendahulukan target kemakmuran belum tentu menghasilkan keadilan.